

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi konsep *good government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, implementasi *good government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang masih belum terlaksana dengan baik sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menyebutkan bahwa hanya beberapa prinsip *good governance* yang sudah terlaksana dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, membangun konsensus dan supremasi hukum. Sedangkan prinsip-prinsip lainnya yaitu peduli pada *stakeholder*, kesetaraan, efektif dan efisien dan visi strategis bukan tidak dilaksanakan tetapi sedang dalam proses untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang masih mempunyai ‘pekerjaan rumah’ untuk mengoptimalkan keempat prinsip tersebut.

Kedua, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *good government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang paling utama adalah sumber daya atau kinerja dari aparat atau birokrat pemerintah daerah yang belum profesional. Aparat pemerintah daerah masih kurang peduli terhadap kedisiplinan terutama disiplin waktu. Contohnya dapat penulis buktikan langsung pada saat penelitian yaitu sebelum jam kerja habis, beberapa aparat Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumedang sudah tidak ada di tempat tanpa alasan yang cukup jelas. Hambatan lainnya yaitu masih kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan *good government* yang baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa aparat pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang yang belum memahami tentang apa dan bagaimana pelaksanaan *good government* yang baik itu. Bahkan *good government* masih kurang dihayati sebagai tata kelola pembangunan (*governance*) yang penting di Kabupaten Sumedang.

Ketiga, upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah pelaksanaan *good government* di Kabupaten Sumedang adalah dengan membentuk atau membangun karakter birokrat yang jujur dan profesional. Profesional disini dimaksudkan bahwa setiap aparat pemerintah daerah harus mempunyai tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai aparat pemerintahan. Upaya lainnya yaitu dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan *good government* di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, misalnya dengan mensosialisasikan seperti apa dan bagaimana *good government* itu seharusnya dilaksanakan.

B. Rekomendasi

Setelah dijelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis akan memaparkan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Pelaksanaan *good government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dirasa masih belum maksimal diharapkan menjadi pekerjaan atau tugas baru bagi seluruh aparat pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Untuk

lebih menghayati bahwa *good government* itu merupakan tata kelola pembangunan yang penting untuk kemajuan Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, seluruh aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus mempunyai satu tujuan yaitu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sumedang yang salah satu visi dan misinya adalah melaksanakan konsep *good government* dengan baik

2. Untuk masyarakat

Untuk mewujudkan *good government*, masyarakat merupakan salah satu dari tiga unsur penting dalam pelaksanaan *good government* diharapkan dapat membantu mewujudkan *good government* yang lebih baik di Kabupaten Sumedang. Beberapa contoh perwujudannya misalnya dengan turut berpartisipasi dalam setiap kebijakan atau dalam pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Sumedang.

Tujuan *good government* bagi masyarakat diantaranya menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mengembangkan sumber daya manusia dan sarana komunikasi antar anggota masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan mampu mewujudkan tujuan tersebut, salah satu caranya dengan turut mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk pembangunan daerah agar menjadi lebih baik dari saat ini.

3. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan setiap anggota DPRD mampu untuk melaksanakan *good government* menjadi lebih baik dari sekarang. Misalnya kesadaran dari setiap anggota DPRD untuk memperbaiki kinerja masing-masing anggota terutama dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya sebagai wakil rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang harus mempunyai aturan atau bahkan sanksi bagi setiap anggota DPRD yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Mungkin dengan adanya aturan atau sanksi yang tegas seluruh anggota DPRD akan lebih baik kinerjanya, dengan begitu pelaksanaan *good government* pun menjadi lebih baik dari sebelumnya.